



**LAPORAN KINERJA
(LKj) DPMPSTSP
TRIBUNAL I
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Veteran No.72 Lumajang
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444
L U M A J A N G - 67316

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan I ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam menjalankan segala aktifitasnya agar dapat dinilai kinerjanya dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang harus di capai, Tujuan dan Sasaran guna mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

LKj ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun berikutnya yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan I ini masih jauh dari sempurna, mengingat latar belakang personil dan pendidikan yang beragam, pengalaman kerja yang masih minim serta kemampuan dalam memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan I yang masih belum optimal. Oleh sebab itu saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang, 13 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURCONO, S.STP., M.Si.
NIP. 19780216 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.....	2
D. Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>).....	5
E. Dasar Hukum.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Rencana Kerja Tahunanan	15
C. Perjanjian kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legimitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Disamping itu LKj merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun

kegagalan pelaksanaan tupoksi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan melembaga. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan I adalah untuk memberikan kontribusi baik pada pemerintah daerah maupun pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan maupun kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan I adalah untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara jelas kepada publik tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dan merupakan data tertulis agar kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dan dapat dipakai sebagai bahan dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

1. Dasar Hukum penetapan SKPD

Cikal bakal berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai peningkatan status Kantor menjadi Dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Struktur Organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang Kemudian di kuatkan oleh Perda Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan.

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sesuai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan

pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

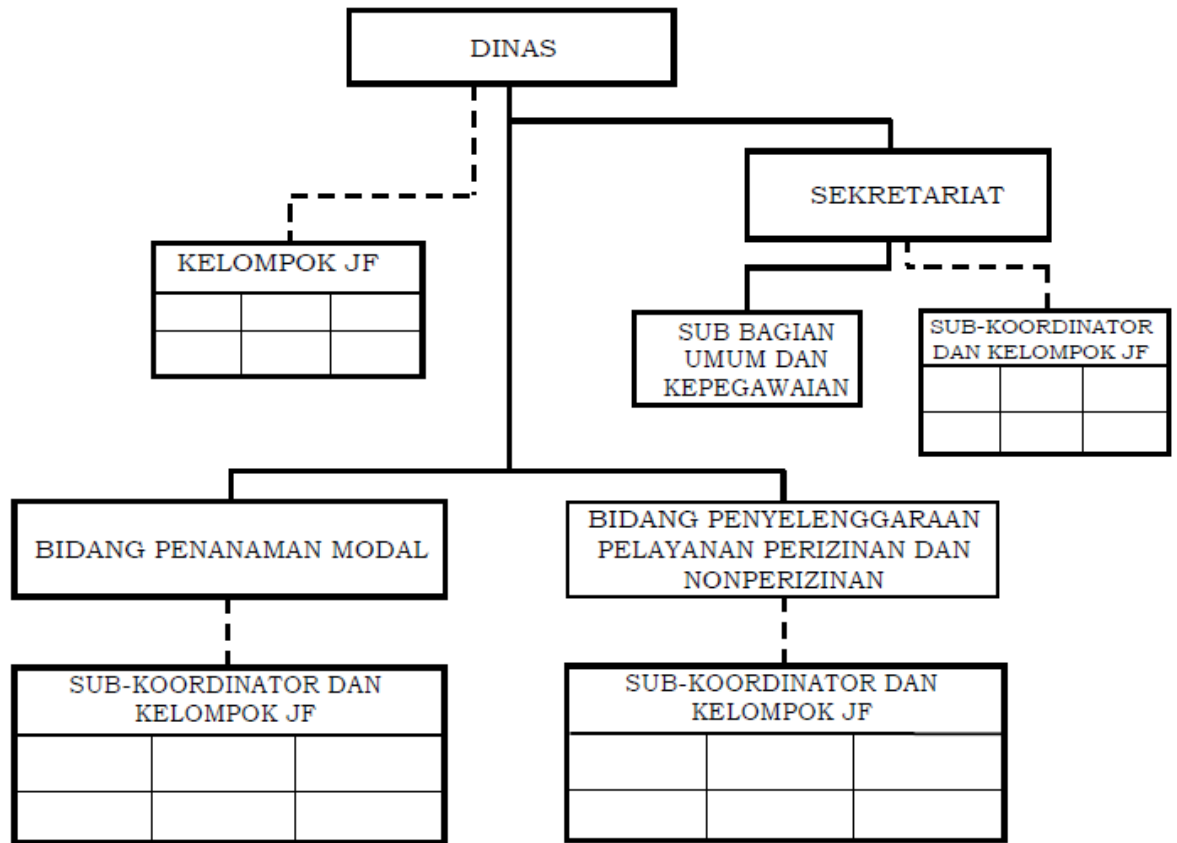
Sedangkan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



D. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Permasalahan pokok pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang pada RPJMD 2018-2023 adalah Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Aparatur Daerah. Dari permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Masalah Pokok DPMPTSP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Masih rendahnya nilai investasi di daerah	Masih rendahnya iklim investasi dan penanaman modal Masih kurangnya upaya promosi penanaman modal

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 - 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis dengan menyusun Perubahan Renstra 2018-2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang selama kurun waktu 2018-2023 adalah **“Meningkat nya Nilai Investasi PMA, PMDN dan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal”**. Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan potensi dan peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1. Visi Kabupaten Lumajang

Visi Kabupaten Lumajang adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”**.

2. Misi Kabupaten Lumajang

Adapun Misi yang mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang tersebut adalah :

Misi Ke 1 yaitu : Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata. Maksudnya meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya

saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, dan jasa pariwisata,serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Misi ke 2 yaitu : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Lebih Sejahtera dan Mandiri.

Maksudnya meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.

Misi Ke 3 yaitu : Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Benar, Dan Bersih (good and clear governance) Yang Berbasis Teknologi Informasi.

Maksudnya mewujudkan pemerintah yang baik, benar, dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan, daerah tersebut.

Berdasarkan ketiga misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lumajang, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”** serta berperan secara aktif dalam misi pertama yaitu **” Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata ”**.

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018-2023 menetapkan tujuan yaitu:

Tabel 2.1 Tujuan DPMPTSP

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	201.756,6 Juta

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu Renstra 2018-2023 adalah :

Tabel 2.2 Sasaran DPMPTSP Tahun 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87,50

c. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah. Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang ialah :

- 1). kemudahan akses informasi terkait potensi dan peluang investasi di daerah;
- 2). melakukan upaya promosi dan publikasi tentang perubahan layanan penanaman modal dan perizinan secara elektronik;
- 3). kemudahan akses layanan perizinan yang berbasis elektronik; dan
- 4). Kemudahan akses layanan perizinan dengan membangun suatu tempat pelayanan terpadu yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP).

d. Program

Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
 - a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 2) Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Rencana Kerja Tahunan

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang kemudian diturunkan dalam target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan), Target Capaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
Meningkatnya nilai Investasi		Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	201.756,6 Juta
	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87,50

Pada Tahun Anggaran 2023 Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	PROGRAM			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15 %	196.586.000
	KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.02.20 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	60 %	41.000.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.000.000
2.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	31.000.000
	KEGIATAN			
2.18.0 2.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun	80 %	155.586.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.202.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	155.586.000
	PROGRAM			
2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Penanaman Modal	201.756,60 Juta	424.474.000
	KEGIATAN			
2.18.03.2 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	424.474.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.03.201.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000
2.18.0 3.201.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan	2 Dokumen	414.474.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
	PROGRAM			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	60 %	405.578.000
	KEGIATAN			
2.18.05.20	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	200 Pelaku Usaha	405.578.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.05.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Pelaku Usaha	271.883.000
2.18.05.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha	133.695.000
	PROGRAM			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90 %	379.027.000
	KEGIATAN			
2.18.04.201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	51 Pelayanan	379.027.000
	SUB KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.04.201.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	353.317.000
2.18.04.201.03	Penyediaan Layanan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	90 Orang	13.560.000
2.18.04.201.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	2.150.000
	PROGRAM			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Layanan Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	75 %	134.560.000
	KEGIATAN			
2.18.06.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan	51 jenis data layanan perizinan dan non perizinan	134.560.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.06.201.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	4 Dokumen	134.560.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
	PROGRAM			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	3.837.660.126
	KEGIATAN			
X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	14.041.000
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.577.500
X.XX.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.371.750
X.XX.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.091.750
X.XX.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.500.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
X.XX.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	2.500.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.215.307.248
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.163.056.248
X.XX.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.251.000
X.XX.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.500.000
X.XX.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.500.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	3.500.000
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	1.500.000
X.XX.01.203.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	2.000.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
		Daerah pada SKPD		
	KEGIATAN			
X.XX.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	31.100.000
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	31.100.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	320.304.810
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.576.000
X.XX.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	163.921.390
X.XX.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.694.620
X.XX.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.000.000
X.XX.01.206.08	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.207.800
X.XX.01.206.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.000.000
X.XX.01.207	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	112.905.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	571.991.576
	SUB KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
X.XX.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	541.991.576
X.XX.01.207.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000
	KEGIATAN			
X.XX.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	502.295.291
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.002.500
X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	291.773.991
X.XX.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	209.518.800
	KEGIATAN			
X.XX.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	179.120.201
	SUB KEGIATAN			
X.XX.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	111.970.201
X.XX.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	37.150.000
X.XX.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000

C. Perjanjian kinerja

Tujuan perjanjian kinerja antara lain ialah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan program, sasaran dan kegiatan pada Tahun 2023 menjadi tumpuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Perjanjian Kinerja ini merupakan janji kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Target
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87,50
No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Rumus	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan	$\frac{\text{(Jumlah capaian seluruh kegiatan)}}{\text{(Jumlah$	100 %

No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Rumus	Target
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Perkantoran	kegiatan penunjang) x 100	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	$(\text{Realisasi tahun } n - \text{Target Realisasi tahun } n) / \text{Target Realisasi tahun } n \times 100$	15 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	201.756,60 Juta
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/ atau Pertimbangan Teknis	$\frac{\text{Jumlah permohonan terlayani}}{\text{Jumlah permohonan yang masuk}} \times 100$	90 %
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha tertib LKPM}}{\text{Jumlah pelaku usaha wajib lapor LKPM}} \times 100$	60 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan yang terintegrasi di sistem e-Simpadu}}{\text{Jumlah jenis layanan sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022}} \times 100$	75 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya, adapun capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tribulan I Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya nilai Investasi		Nilai Investasi	201.756,6 Juta	362.829,36 Juta	180%
	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta	989,75 Juta	43%
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	199.451,17 Juta	361.839,61 Juta	181%
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,5	Dalam proses survei kepada Responden	0%

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan I tahun 2023 (data diolah)

Pada Tabel 3.1 disajikan capaian realisasi target sasaran strategis DPMPSTP. Pada tabel tersebut dapat disampaikan bahwa sasaran :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat di Sektor Penanaman Modal belum dapat disajikan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tribulan I Tahun 2023 dikarenakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) yang dilaksanakan secara terpadu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang masih dalam tahap pengiriman kuesioner kepada responden, sehingga nilai IKM dapat diperoleh pada awal Mei.

2. Meningkatnya nilai investasi PMA masih belum tercapai 100% namun pada perhitungan manual dari penyampaian LKPM telah tercapai 45% dari target yang ditentukan, hal ini dikarenakan masih belum seluruhnya Penanam Modal Asing (PMA) menyampaikan LKPM.
3. Meningkatnya nilai investasi PMDN telah tercapai lebih dari 100% yang didapatkan dari hasil perhitungan manual penyampaian LKPM oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), hal ini dikarenakan semakin tertibnya penyampaian LKPM oleh PMDN.

Pada Tabel 3.2 disajikan capaian realisasi target Program dan Kegiatan DPMPTSP. Pada tabel tersebut seluruh Program telah tercapai target kinerja yang telah ditentukan dengan rata-rata capaian diatas 100%. Namun pada target kegiatan terdapat 2 kegiatan yang belum mencapai target, yaitu Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Dimana faktor penghambatnya adalah :

1. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perda No 10 Tahun 2021 masih dalam proses Harmonisasi di Biro Hukum Surabaya yang salah satunya tentang pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.
2. Belum adanya Peta Potensi Investasi Digital pada perencanaan tahun 2022.

Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut :

1. Secara aktif berkolaborasi dengan Bagian Hukum dalam proses harmonisasi rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda No 10 Tahun 2021.
2. Melakukan penyusunan aplikasi Peta Potensi Investasi berbasis *Web Geografic Information System* (GIS) pada dokumen perencanaan tahun 2023.

Tabel 3.2 Capaian Program dan Kegiatan Tribulan I Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	PROGRAM							
2.1 8.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15 %	196.519.000	-60 %	5.400.000	-400%	2,75%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	60 %	41.000.000	0 %	5.400.000	0%	13,17%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
2.1 8.0 2.2 01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	31.000.000	0 Kegiatan Usaha	5.400.000	0%	17,42%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun	80 %	155.519.000	0 %	-	0%	0,00%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	155.519.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
	PROGRAM							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Penanaman Modal	201.756,60 Juta	424.473.500	362.829,36 Juta	3.415.000	180%	0,80%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 3.2 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	424.473.500	0 Orang	3.415.000	0%	0,80%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 3.2 01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	3.415.000	100%	34,15%
2.1 8.0 3.2 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	414.473.500	0 Dokumen	-	0%	0,00%
	PROGRAM							
2.1 8.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	60 %	365.042.850	4 %	48.863.000	7%	13,39%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 5.2 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	200 Pelaku Usaha	365.042.850	8 Pelaku Usaha	48.863.000	4%	13,39%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 5.2 01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Pelaku Usaha	231.359.850	50 Pelaku Usaha	41.193.000	20%	17,80%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 5.2 01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha	133.683.000	0 Kegiatan Usaha	7.670.000	0%	5,74%
	PROGRAM							
2.1 8.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90 %	369.868.270	100 %	52.039.000	111%	14,07%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 4.2 01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	51 Pelayanan	369.868.270	51 Pelayanan	52.039.000	100%	14,07%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 4.2 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	344.293.270	4348 Pelaku Usaha	51.812.000	145%	15,05%
2.1 8.0 4.2 01. 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	90 Orang	13.425.000	127 Orang	227.000	141%	1,69%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 4.2 01. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	12.150.000	0 Kegiatan Usaha	-	0%	0,00%
	PROGRAM							
2.1 8.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	75 %	134.560.000	84 %	5.100.000	112%	3,79%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 6.2 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan	51 jenis data layanan perizinan dan non perizinan	134.560.000	51 jenis data layanan perizinan dan non perizinan	5.100.000	100%	3,79%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 6.2 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	134.560.000	1 Dokumen	5.100.000	25%	3,79%
	PROGRAM							
2.1 8.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	3.846.229.524	22 %	812.459.724	22%	21,12%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	15.290.000	15 %	731.000	15%	4,78%
	SUB KEGIATAN							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 1.2 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.410.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
2.1 8.0 1.2 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.100.000	0 Dokumen	102.000	0%	3,29%
2.1 8.0 1.2 01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
2.1 8.0 1.2 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.500.000	0 Laporan	-	0%	0,00%
2.1 8.0 1.2 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	6.280.000	4 Laporan	629.000	25%	10,02%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.211.909.998	59 %	512.753.432	59%	23,18%
	SUB KEGIATAN							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 1.2 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.163.056.248	20 Orang/Bulan	501.152.682	100%	23,17%
2.1 8.0 1.2 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	45.399.000	3 Dokumen	11.306.000	25%	24,90%
2.1 8.0 1.2 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.499.750	6 Laporan	294.750	100%	11,79%
2.1 8.0 1.2 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	955.000	4 Laporan	-	22%	0,00%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	3.353.500	0 %	-	0%	0,00%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	1.495.000	0 dokumen	-	0%	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 1.2 03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.858.500	0 Laporan	-	0%	0,00%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100 %	31.100.000	0 %	-	0%	0,00%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	31.100.000	0 Paket	-	0%	0,00%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100 %	327.427.127	21 %	37.806.461	21%	11,55%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.549.887	0 Paket	-	0%	0,00%
2.1 8.0 1.2 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	169.945.702	1 Paket	23.735.300	100%	13,97%
2.1 8.0 1.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.864.038	1 Paket	116.000	100%	0,78%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
06.05								
2.1 8.0 1.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.000.000	9 Dokumen	605.000	19%	10,08%
2.1 8.0 1.2 06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.191.500	3 Paket	1.135.000	25%	9,31%
2.1 8.0 1.2 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.150.000	3 Laporan	701.400	25%	22,27%
2.1 8.0 1.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	113.726.000	2 Laporan	11.513.761	14%	10,12%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	580.232.451	1 %	110.750.250	1%	19,09%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	550.496.306	1 Unit	110.750.250	1%	20,12%
2.1 8.0 1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	29.736.145	0 Unit	-	0%	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
07.02		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	494.110.000	25 %	117.488.334	25%	23,78%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.060.000	3 Laporan	29.500	25%	2,78%
2.1 8.0 1.2 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	305.370.000	6 Laporan	70.607.384	25%	23,12%
2.1 8.0 1.2 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	187.680.000	21 Laporan	46.851.450	25%	24,96%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	182.806.448	22 %	32.930.247	22%	18,01%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 1.2 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	114.919.600	3 Unit	25.171.869	25%	21,90%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.1 8.0 1.2 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	38.150.000	13 Unit	7.758.378	22%	20,34%
2.1 8.0 1.2 09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.736.848	0 Unit	-	0%	0,00%
PROGRAM								
2.1 8.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15 %	196.519.000	-60 %	5.400.000	-400%	2,75%
KEGIATAN								
2.1 8.0 2.2 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	60 %	41.000.000	0 %	5.400.000	0%	13,17%
SUB KEGIATAN								
2.1 8.0 2.2 01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
2.1 8.0 2.2 01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	31.000.000	0 Kegiatan Usaha	5.400.000	0%	17,42%
KEGIATAN								
2.1 8.0 2.2 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun	80 %	155.519.000	0 %	-	0%	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 2.2 02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	155.519.000	0 Dokumen	-	0%	0,00%
	PROGRAM							
2.1 8.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Penanaman Modal	201.756,60 Juta	424.473.500	362.829,36 Juta	3.415.000	180%	0,80%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 3.2 01. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	424.473.500	0 Orang	3.415.000	0%	0,80%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 3.2 01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	3.415.000	100%	34,15%
2.1 8.0 3.2 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	414.473.500	0 Dokumen	-	0%	0,00%
	PROGRAM							
2.1 8.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	60 %	365.042.850	4 %	48.863.000	7%	13,39%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 5.2 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	200 Pelaku Usaha	365.042.850	8 Pelaku Usaha	48.863.000	4%	13,39%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 5.2 01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Pelaku Usaha	231.359.850	50 Pelaku Usaha	41.193.000	20%	17,80%
2.1 8.0 5.2 01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha	133.683.000	0 Kegiatan Usaha	7.670.000	0%	5,74%
	PROGRAM							
2.1 8.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90 %	369.868.270	100 %	52.039.000	111%	14,07%
	KEGIATAN							
2.1 8.0 4.2 01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	51 Pelayanan	369.868.270	51 Pelayanan	52.039.000	100%	14,07%
	SUB KEGIATAN							
2.1 8.0 4.2 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	344.293.270	4348 Pelaku Usaha	51.812.000	145%	15,05%
2.1 8.0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan	90 Orang	13.425.000	127 Orang	227.000	141%	1,69%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
4.2 01. 03	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						
2.1 8.0 4.2 01. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	12.150.000	0 Kegiatan Usaha	-	0%	0,00%

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan I tahun 2023 (data diolah)

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
 Capaian kinerja DPMPSTSP tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023

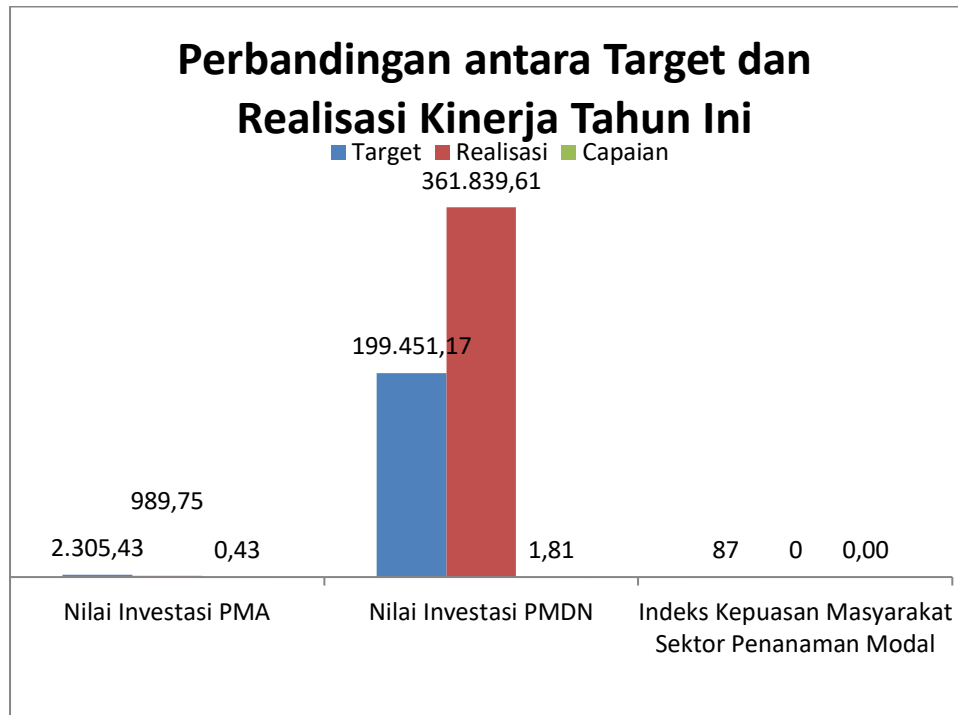
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta	989,75 Juta	43%
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	199.451,1 7 Juta	361.839,61 Juta	181%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,50	Dalam proses survei kepada Responden	0%

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan I tahun 2023 (data diolah)

Pada tabel 3.3 disajikan data perbandingan target capaian kinerja dan realisasi kinerja tahun 2023. Dimana capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal belum dapat disajikan karena masih dalam tahap survei kepada responden yang dilakukan secara terpadu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Pada Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMA pada periode tribulan I tahun 2023 belum mencapai target dengan capaian 45%. Pada Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMDN capaian target lebih dari 100% dengan capaian nilai investasi PMDN naik sebesar 190% dari tahun sebelumnya. Tingkat capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM dengan inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) dan penerapan sistem OSS-RBA yang sudah berjalan dengan baik, serta peningkatan sarana prasarana dan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP Kabupaten Lumajang.

Gambaran perbandingan antara target, realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja DPMPSTSP tahun 2019-2023 yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	38.314,5 Juta	1.991,5 Juta	1.384 Juta	21.197,79 Juta	989,75 Juta	100%	100%	66%	965%	43%
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	25.114,8 Juta	172.293,4 Juta	59.891 Juta	537.753,8 Juta	361.839 ,61 Juta	100%	100%	33%	283%	181%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	86,13	86,33	86,57	87,6	Dalam proses survei kepada Respon den	101,33 %	100,38 %	100,08%	100,69%	0%

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan I tahun 2023 (data diolah)

Pada tabel 3.4 pada tribulan I tahun 2023 masih belum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN. Pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal belum dapat diukur karena masih dalam tahap survei kepada responden yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Gambaran Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja 5 Tahun Sebelumnya



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023

Rencana kerja tahun 2023 merupakan gradasi dari Rencana Strategis DPMPTSP yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2018-2023.

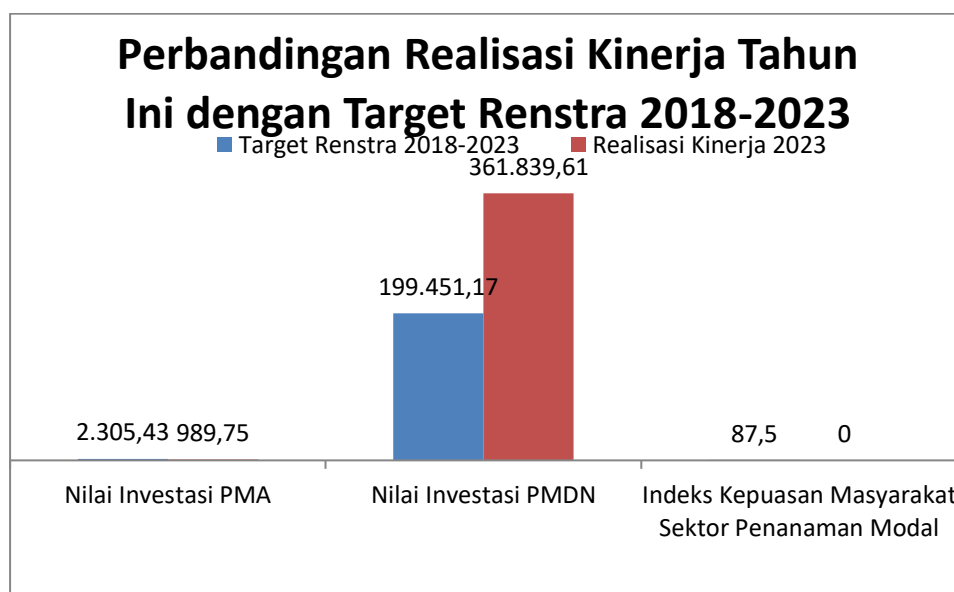
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		
				Target Renstra	Realisasi	C
Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi			201.756,6 Juta	362.829,3 6 Juta	180%
		Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.305,43 Juta	989,75 Juta	43%
		Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN	199.451,1 7 Juta	361.839,6 1 Juta	181%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,5	Dalam proses survei kepada Responden	0,00 %

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan I tahun 2023 (data diolah)

Pada tahun 2023 realisasi kinerja DPMPSTSP dibandingkan dengan target capaian kinerja pada Renstra 2018-2023 terdapat 1 Sasaran yang telah mencapai lebih dari 100% yaitu Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dengan capaian 181%, sedangkan 2 sasaran yang lain masih belum tercapai karena masih dalam proses perhitungan seperti ditampilkan pada tabel 3.5 dan gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standart Nasional

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional	Capaian
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	989,75 Juta	-	-
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	361.839,61 Juta	-	-
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	Dalam proses survei kepada Responden	-	-

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan I tahun 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa indikator kinerja sasaran DPMPTSP tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan capaian DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dikarenakan masih dalam proses perhitungan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022 seluruh target Sasaran Kinerja DPMPTSP telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan Renstra 2018-2023 dengan capaian kinerja berada diatas 100%. Kenaikan ini merupakan bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi yang dibuat pada DPMPTSP telah mampu dalam menunjang tercapainya target serta dapat dirasakan oleh masyarakat yang memohonkan izin usahanya maupun layanan lain yang diterima dari DPMPTSP.

Adapun pada sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMDN pada tahun 2022 terdapat kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan capaian pada tahun 2020 dan 2021 yaitu mencapai lebih dari 120%. Pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal terjadi kenaikan pula dari tahun 2020 dan 2021 yaitu mencapai 101%. Disamping meningkatnya capaian seluruh sasaran kinerja, Kabupaten Lumajang juga telah berhasil membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di Jalan Veteran No. 72 Lumajang dan telah diujicoba pada 24 September 2022 serta diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 5 Desember 2022. Dengan adanya MPP tersebut mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui 18 gerai pelayanan yang terdiri dari 7 Perangkat Daerah dan 11 Kementerian/Lembaga dengan 127 jenis layanan.

Dalam usaha mewujudkan capaian kinerja tersebut terdapat faktor-faktor penunjang keberhasilan yang mempengaruhi, antara lain :

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN);
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- d. Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi;
- e. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah;
- f. Adanya sistem pelayanan berbasis elektronik yang mudah diakses; dan
- g. Performa petugas pelayanan yang baik.

Disamping faktor penunjang keberhasilan terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi disemua sektor unggulan daerah
- b. Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO) / Feasibility Study (FS) yang menunjang kegiatan promosi pada seluruh potensi investasi
- c. Belum tersusunnya peta potensi investasi yang dapat diakses secara langsung oleh investor
- d. Kurang optimalnya peranan Tim Koordinasi Percepatan Investasi dalam melaksanakan Program Kerja yang sudah di susun
- e. Kurangnya informasi masyarakat tentang layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU dan DAK Non-Fisik. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 :

Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	5.336.693.144	927.276.724	17,38%
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN			

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal			

Dari tabel 3.7 terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang periode Triwulan I Tahun 2023 dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran tahun 2023 sesuai *time schedule*/Rencana Anggaran Kas yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektifitas anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjang dengan keberadaan inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) yang mampu meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Lumajang dan terbangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menunjang efisiensi dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat yang mencakup 18 gerai pelayanan (instansi yang tergabung terdiri dari 7 OPD dan 11 Kementerian/Lembaga dengan 127 jenis layanan).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada periode Triwulan I tahun 2023 terdapat 3 Program yang diampu oleh DPMPTSP telah mencapai target yang ditentukan, dengan capaian rata-rata diatas 100%. Disamping program yang melebihi target terdapat pula beberapa program yang masih belum tercapai, kendala yang dialami adalah masih belum selesainya seluruh kegiatan yang direncanakan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sampai dengan Desember tahun 2023. Program-program tersebut yang telah mencapai lebih dari 100% turut berkontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis dan Tujuan DPMPTSP, dengan capaian Tujuan DPMPTSP sebesar 362 Miliar yang telah melebihi target sebesar 161 Miliar dengan capaian 180%. Capaian tersebut ditunjang langsung oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha secara berkelanjutan guna menjamin kegiatan usaha telah dilakukan sesuai standar dan terselesaikannya hambatan-hambatan yang dialami.

Disamping itu ditunjang pula dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang menyediakan pelayanan penerbitan izin dan non izin, Konsultasi dan Pengaduan. Dimana tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanaman modal yang diterima turut mempengaruhi tingkat kepercayaan penanaman modal untuk berinvestasi di Kabupaten Lumajang. serta didukung dengan sarana dan prasarana penunjang lain yang disediakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari uraian tersebut dapat diambil beberapa faktor penyebab keberhasilan program tersebut adalah :

- a. Adanya komitmen dari Kepala Dinas serta kesigapan petugas pelayanan dalam melayani pemohon dan ketersediaan SP dan SOP yang telah diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang teknis.
- b. Adanya Inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) dengan sasaran meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketertiban pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya melalui penyampaian LKPM secara online.
- c. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengintegrasikan instansi perangkat daerah dan kementerian/lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi serta bertanda tangan elektronik yang mampu memberikan percepatan penerbitan izin dan non izin.

Namun terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perda No 10 Tahun 2021 yaitu Pemberian Insentif/Fasilitas Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha masih dalam proses Harmonisasi di Biro Hukum Surabaya.
- b. Belum adanya Peta Potensi Investasi yang mampu menggambarkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Lumajang berbasis GIS.
- c. Mindset pelaku usaha tentang penyampaian LKPM yang memiliki konsekuensi terhadap penagihan pajak sehingga berdampak belum tertibnya penyampaian LKPM.
- d. Belum sinerginya SOP layanan perizinan antar perangkat daerah, sehingga proses rekomendasi teknis membutuhkan waktu yang relatif lama.

8. Permasalahan dan Inovasi DPMPTSP Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Belum tertibnya pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usaha pada aplikasi LKPM online.
- b. Belum adanya peta potensi investasi dari data potensi investasi masing - masing sektor.
- c. Belum tersusunnya I-PRO (Feasibility study) pada potensi investasi yang ada.
- d. Belum optimalnya penyampaian informasi persyaratan dan prosedur layanan yang diberikan
- e. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.

- b. Pelayanan Cepat Tanggap (Fast Response) untuk pelayanan jemput bola terjadwal.
- c. Pengembangan fitur peta potensi investasi digital yang terintegrasi dengan website resmi DPMPTSP.
- d. Merencanakan penambahan sarana dan prasarana dalam dokumen perencanaan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ialah :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	PROGRAM			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	196.519.000	5.400.000	2,75%
	KEGIATAN			
2.18.02.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000	5.400.000	13,17%
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.000.000	-	0,00%
2.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	31.000.000	5.400.000	17,42%
	KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.02.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	155.519.000	-	0,00%
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.202.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	155.519.000	-	0,00%
	PROGRAM			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	424.473.500	3.415.000	0,80%
	KEGIATAN			
2.18.03.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	424.473.500	3.415.000	0,80%
	SUB KEGIATAN			
2.18.03.201.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000	3.415.000	34,15%
2.18.03.201.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	414.473.500	-	0,00%
	PROGRAM			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	365.042.850	48.863.000	13,39 %
	KEGIATAN			
2.18.05.201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	365.042.850	48.863.000	13,39%
	SUB KEGIATAN			
2.18.05.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	231.359.850	41.193.000	17,80%
2.18.05.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	133.683.000	7.670.000	5,74%
	PROGRAM			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	369.868.270	52.039.000	14,07 %
	KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.04.201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	369.868.270	52.039.000	14,07%
	SUB KEGIATAN			
2.18.04.201.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	344.293.270	51.812.000	15,05%
2.18.04.201.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	13.425.000	227.000	1,69%
2.18.04.201.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12.150.000	-	0,00%
	PROGRAM			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	134.560.000	5.100.000	3,79%
	KEGIATAN			
2.18.06.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	134.560.000	5.100.000	3,79%
	SUB KEGIATAN			
2.18.06.201.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	134.560.000	5.100.000	3,79%
	PROGRAM			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.846.229.524	812.459.724	21,12 %
	KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.290.000	731.000	4,78%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.410.000	-	0,00%
2.18.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.100.000	102.000	3,29%
2.18.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-	0,00%
2.18.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	-	0,00%
2.18.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.280.000	629.000	10,02%
	KEGIATAN			
2.18.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.909.998	512.753.432	23,18%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.163.056.248	501.152.682	23,17%
2.18.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.399.000	11.306.000	24,90%
2.18.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.750	294.750	11,79%
2.18.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	955.000	-	0,00%
	KEGIATAN			
2.18.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.353.500	-	0,00%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.495.000	-	0,00%
2.18.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.858.500	-	0,00%
	KEGIATAN			
2.18.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.100.000	-	0,00%
	SUB KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01. 205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.100.000	-	0,00%
	KEGIATAN			
2.18.01. 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.427.127	37.806.461	11,55%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01. 206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.549.887	-	0,00%
2.18.01. 206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.945.702	23.735.300	13,97%
2.18.01. 206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.864.038	116.000	0,78%
2.18.01. 206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	605.000	10,08%
2.18.01. 206.07	Penyediaan Bahan/Material	12.191.500	1.135.000	9,31%
2.18.01. 206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.150.000	701.400	22,27%
2.18.01. 206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.726.000	11.513.761	10,12%
	KEGIATAN			
2.18.01. 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.232.451	110.750.250	19,09%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01. 207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	550.496.306	110.750.250	20,12%
2.18.01. 207.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.736.145	-	0,00%
	KEGIATAN			
2.18.01. 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.110.000	117.488.334	23,78%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01. 208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.060.000	29.500	2,78%
2.18.01. 208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.370.000	70.607.384	23,12%
2.18.01. 208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.680.000	46.851.450	24,96%
	KEGIATAN			
2.18.01. 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.806.448	32.930.247	18,01%
	SUB KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01. 209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.919.600	25.171.869	21,90%
2.18.01. 209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.150.000	7.758.378	20,34%
2.18.01. 209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.736.848	-	0,00%

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran yang disediakan untuk mewujudkan Target Kinerja			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta	989,75 Juta	45%	5.336.693.144	927.276.724	17,38%	61,15%
2	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta	361.839,61 Juta	190%				
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,5	Dalam proses survei kepada Responden	0%				

Sumber data : Rekapitulasi realisasi investasi manual dari LKPM Triwulan I tahun 2023 (data diolah)

Jika dibandingkan sasaran dan indikator kinerja utama tersebut di tahun 2023 rata-rata tercapai 78 % (Baik) dari targetnya sedangkan realisasi anggaran Triwulan I TA. 2023 terealisasi 17,38% atau dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 61,15%.

Besarnya efisiensi tersebut disebabkan oleh capaian kinerja indikator kinerja utama Nilai Investasi PMDN melebihi ekspektasi yang telah ditargetkan dengan beberapa faktor penunjang diantaranya adalah komitmen dari Kepala Dinas; meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM oleh pelaku usaha yang ditunjang dengan inovasi LILIN; terbangunnya MPP sebagai tempat pelayanan terintegrasi dengan instansi perangkat daerah dan kementerian/lembaga; dan tersedianya sistem pelayanan berbasis elektronik yang memudahkan dalam pelayanan.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator kinerja DPMPTSP memiliki tingkat efisiensi positif. Hal ini menjadi bahan motivasi kami dalam percepatan pencapaian target indikator sasaran DPMPTSP dengan menekankan aspek efektifitas disamping efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Triwulan I merupakan pertanggungjawaban manajerial, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Kinerja ini memuat hasil yang telah dicapai pada tahun 2023 sampai dengan periode Triwulan I. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I telah menunjukkan peningkatan dengan tercapainya target kinerja pada Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Meskipun dalam perjalanannya terdapat pula permasalahan dan hambatan yang harus ditanggulangi dan ditingkatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hambatan yang dihadapi dan upaya dalam perbaikannya ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

NO	HAMBATAN	UPAYA
1	Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi disemua sektor unggulan daerah	Optimalisasi promosi peluang investasi dengan fokus pada sektor unggulan di Kabupaten Lumajang
2	Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO) / Feasibility Study (FS) yang menunjang kegiatan promosi pada seluruh potensi investasi	Merencanakan dan melakukan penyusunan IPRO/FS pada tahun anggaran berikutnya
3	Belum tersusunnya peta potensi investasi yang dapat	Melakukan penyusunan peta potensi investasi yang dapat

NO	HAMBATAN	UPAYA
	diakses secara langsung oleh investor	diakses secara langsung oleh calon investor
4	Kurang optimalnya peranan Tim Koordinasi Percepatan Investasi dalam melaksanakan Program Kerja yang sudah di susun	Optimalisasi Tim Percepatan Berusaha dengan melakukan evaluasi capaian Program Kerja yang telah disusun
5	Kurangnya informasi masyarakat tentang layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana publikasi informasi layanan Perizinan dan Non Perizinan, serta meningkatkan keandalan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi secara elektronik

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, saran dan kiritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam penyusunan laporan kinerja selanjutnya. Semoga dengan disusunnya laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 13 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURCONO, S.STP., M.Si.

NIP. 19780216 199703 1 001

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARI MURCONO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Pihak Pertama,

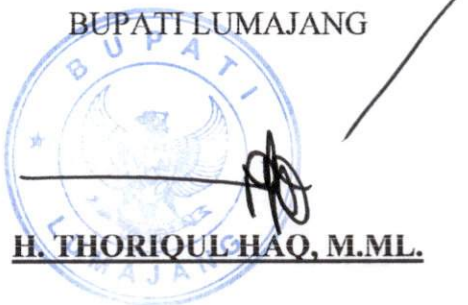

ARI MURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Rp. 2.305.433.459
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Rp. 199.451.170.381
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,50
No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Pcnanaman Modal	201.756,60 Juta
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/ atau Pertimbangan Teknis	90 %
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	60 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	75 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA;	Rp. 3.837.660.126	APBD
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL;	Rp. 196.586.000	APBD
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL;	Rp. 424.474.000	APBD
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL;	Rp. 405.578.000	APBD DAN DAK
5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL;	Rp. 379.027.000	APBD
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.	Rp. 134.560.000	APBD

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQULHAQ, M.ML.

Lumajang, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PILAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran No. 72 Telepon. (0334) 889822 - Fax. 894444

Email : dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67316

**PENCAPAIAN NILAI REALISASI INVESTASI TRI BULAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHUN 2023**

NO	TRIWULAN	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI PMA TRIWULANAN	NILAI INVESTASI PMDN TRIWULANAN	NILAI INVESTASI TRIWULANAN	NILAI KOMULATIF DARI TAHUN KE-N	KETERANGAN
1	TRIWULAN I	60	7258	989.751.454	361.839.606.530	362.829.357.984	362.829.357.984	Nilai realisasi investasi berdasarkan perhitungan manual dari penyampaian LKPM
2	TRIWULAN II	0	0	-	-	-	362.829.357.984	
3	TRIWULAN III	0	0	-	-	-	362.829.357.984	
4	TRIWULAN IV	0	0	-	-	-	362.829.357.984	

Lumajang, 13 April 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001